

I.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

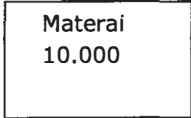
Nama	:		(1)
NPWP/Nomor Identitas Pajak*)	:		(2)
Jabatan	:		(3)
Alamat	:		(4)

Bertindak selaku	:	Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)	
Nama	:		(5)
NPWP	:		(6)
Alamat	:		(7)

- dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (8) tanggal (9) hal (10) akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
 2. Bersedia membantu Direktur Jenderal Pajak dalam menyediakan informasi dan/atau bukti atau keterangan selain informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... (11)
Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (12)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.